

**BAB IV**  
**ANALISA DAN PEMBAHASAN**

**A. Perusahaan Sampel**

**1. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali Jawa Tengah. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku UMKM. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden yang berada di KPP Pratama Boyolali. Jumlah kuesioner yang dikirimkan adalah sebanyak 100 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 100 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 3. Kuesioner yang tidak lengkap 2. Kuesioner yang dapat diolah berjumlah 95. Gambaran mengenai data sampel ini dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1  
Data Sampel Penelitian

NO	Keterangan	Wajib Pajak
1	Jumlah kuesioner yang disebar	100
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	(3)
3	Jumlah kuesioner yang kembali	97
4	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	(2)
6	Data siap olah	95

Sumber: Data primer diolah, 2014.

## B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak pelaku UMKM. Berikut ini adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, kepemilikan NPWP, dan lama menjadi Wajib Pajak.

### 1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2  
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	67	70,5%
Perempuan	28	29,5%
Jumlah	95	100%

Sumber : Data primer diolah, 2014

Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa sekitar 67 orang atau 70,5% responden didominasi oleh jenis kelamin laki-laki, dan sisanya sebesar 28 orang atau 29,5% responden berjenis kelamin perempuan.

### 2. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.3  
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
20-25 tahun	11	11,6%
26-30 tahun	19	20%
31-35 tahun	18	18,9%
36-40 tahun	17	17,9%
>40 tahun	30	31,6%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan table 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berusia >40 tahun dengan jumlah 30 responden atau 31,6%. Kemudian

sebesar 20% atau sebanyak 19 orang responden berusia 26-30 tahun, sebesar 18,9% atau sebanyak 18 responden berusia 31-35 tahun, sebesar 17,9% atau sebanyak 17 responden berusia 36-40 tahun, sedangkan sisanya sebesar 11,6% atau sebanyak responden berusia 20-25 tahun.

### 3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tabel 4.4  
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SLTA	15	15,8%
D3	19	20%
S1	38	40%
S2	9	9,5%
Lainnya	14	14,7%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berpendidikan terakhir Strata Satu (S1) dengan jumlah 38 responden atau 40%. Kemudian sebesar 20% atau sebanyak 19 orang berpendidikan terakhir Diploma III (D3), sebesar 15.8% atau sebanyak 15 orang berpendidikan terakhir SLTA dan sebesar 9.5% atau sebanyak 9 orang berpendidikan terakhir Strata Dua (S2) dan yang lainnya sebesar 14,7% atau sebesar 14 orang.

#### 4. Deskripsi Responden Berdasarkan Punya Atau Belum Punya NPWP

Tabel 4.5  
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan NPWP

NPWP	Jumlah	Persentase
Sudah Punya	95	100%
Belum Punya	0	0%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa semua responden mempunyai NPWP yaitu sebesar 100% atau sebanyak 95 responden.

#### 5. Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak

Tabel 4.6  
Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menjadi WP

Lama Menjadi WP	Jumlah	Persentase
1-5 tahun	15	15,8%
6-10 tahun	28	29,5%
11-15 tahun	27	28,4%
>15 tahun	25	26,3%
Jumlah	95	100%

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden telah menjadi Wajib Pajak selama 6-10 tahun atau sebesar 29,5%. Kemudian sebesar 28,4% atau sebanyak 27 orang telah menjadi Wajib Pajak selama 11-15 tahun, sebesar 26,3 % atau sebesar 25 orang telah menjadi Wajib Pajak lebih dari 15 tahun dan sisanya sebesar 15,8% atau sebesar 15 orang telah menjadi Wajib Pajak selama 1-5 tahun.

## 6. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Tabel 4.7  
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Jenis Usaha	Jumlah	Persentase
Jasa	36	37,9%
Dagang	59	62,1%
Jumlah	95	100%

Tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa sekitar 59 orang atau 62,1% responden didominasi oleh usaha dagang, dan sisanya sebesar 36 orang atau 37,9% responden memiliki jenis usaha dibidang jasa.

## 7. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Tabel 4.8  
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Jenis Wajib Pajak	Jumlah	Persentase
WP Badan	73	76,8%
WP Pribadi	22	23,2%
Jumlah	95	100%

Tabel 4.8 diatas menunjukan bahwa sekitar 73 orang atau 76,8% responden didominasi oleh wajib pajak badan, dan sisanya sebesar 22 orang atau 23,2% responden wajib pajak dagang.

## C. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

### 1. Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas menggunakan rumus korelasi *product moment person*, jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$  berarti item valid. Sebaliknya  $r_{hitung} < r_{tabel}$  berarti item tidak valid (Ghozali, 2011:47). uji validitas di lakukan dengan malakukan uji korelasi antara pernyataan masing-masing variabel dengan skor total (*item total corelation*). Hasil uji validitas secara lengkap disajikan

pada lampiran 4. Ringkasan hasil uji validitas dapat dilihat pada tabel 4.9

Tabel 4.9  
Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Item	$R_{hitung}$	$R_{tabel}$	Keterangan
Q1	0,776	0,202	Valid
Q 2	0,740	0,202	Valid
Q 3	0,801	0,202	Valid
Q 4	0,720	0,202	Valid
Q5	0,786	0,202	Valid
Q6	0,832	0,202	Valid
Q7	0,843	0,202	Valid
Q8	0,762	0,202	Valid
Q9	0,613	0,202	Valid
Q10	0,744	0,202	Valid
Q11	0,831	0,202	Valid
Q12	0,825	0,202	Valid
Q13	0,755	0,202	Valid
Q14	0,811	0,202	Valid
Q15	0,800	0,202	Valid
Q16	0,751	0,202	Valid
Q17	0,643	0,202	Valid

Sumber: Data primer diolah, 2014.

Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel di atas menunjukkan koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (*item total corelation*) semua pernyataan memiliki  $r_{hitung}$  lebih dari  $r_{tabel}$ , maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.

## 2. Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.70 (Ghozali, 2011:41-42). Hasil uji reliabilitas dari

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel 4.10. Dan hasil uji reliabilitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 4.10  
Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,747	Reliable
Pelayanan Fiskus	0,816	Reliable
Sanksi Pajak	0,750	Reliable
Kepatuhan Wajib pajak	0,804	Reliable

Sumber: Data Primer diolah, 2014.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel dengan menggunakan *cronbach alpha* bahwa semua variabel memiliki nilai alpha > 0.70 maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian ini dikatakan reliabel.

#### D. Uji Asumsi Klasik

##### 1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah data dari masing-masing variabel memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji *One Kolmogorov-Smirnov* dalam melakukan uji normalitas data. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table 4.11.

Tabel 4.11.  
Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1,141
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,148
Keterangan	Normal

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Dari data di atas diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* sebesar 0,148. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi adanya hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi berganda. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi berganda dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance Inflation factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model tersebut bebas dari multikolinearitas (Ghozali.2011:106). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada table 4.12.

Tabel.4.12  
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,603	1,658	Bebas Multikolinearitas
Pelayanan Fiskus	0,571	1,752	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,615	1,627	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan



nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji *Glejser* dapat ditunjukkan dalam table 4.13.

Tabel.4.13  
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	$t_{hitung}$	$p-value$	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	-0,676	0,501	Bebas Heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus	-0,202	0,840	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak	0,289	0,773	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 4.13. tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai  $p-value$  lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel, bebas dari heteroskedastisitas.

### 4. Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* dapat dilihat pada table 4.14.

Tabel.4.14  
Hasil Uji Autokorelasi

uji <i>Durbin-Watson</i>	
DW	2,094
Du	1,703
4-du	2,297
Keterangan	Bebas Autokorelasi

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson*, nilai DW sebesar 2,094

dimana angka tersebut berada pada  $dU < DW < 4-dU$  yaitu  $1,703 < 2,094 < 2,297$ . Yang artinya model tersebut tidak terdapat autokorelasi.

### E. Hasil Analisis Regresi

Adapun hasil analisis data yang diperoleh dengan program SPSS 16 dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada table 4.15.

Tabel 4.15.  
Hail Uji Regresi Berganda

Variabel	Koefisien		
	Regresi	$t_{hitung}$	Sig
Konstanta	-0,097	-0,203	0,840
Kesadaran Wajib Pajak	0,147	4,729	0,000
Pelayanan Fiskus	0,989	29,622	0,000
Sanksi Pajak	0,127	3,448	0,001
$R^2 = 0,958$		Fhitung = 6,984	
Adjusted $R^2 = 0,957$		Sig = 0,000	

Sumber: Hasil olah data, 2014.

Model dari penelitian ini adalah:

$$KWP = -0,097 + 0,147KSP + 0,989PFS + 0,127SPJ + \varepsilon$$

Untuk menginterpretasikan hasil dari analisis tersebut, dapat diterangkan:

- a. Nilai konstanta sebesar -0,097 menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, sanksi perpajakan diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka besarnya kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM akan menurun.
- b. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel

kesadaran Wajib Pajak bernilai positif sebesar 0,147. Artinya apabila semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM akan meningkat.

- c. Koefisien regresi variabel pelayanan fiskus bernilai positif sebesar 0,989. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
- d. Hasil uji hipotesis untuk variabel sanksi perpajakan menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,127. Dari hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

## **F. Hasil Uji Hipotesis**

### **1. Uji Fit Model (Uji F) dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: Untuk variabel kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM didapatkan hasil bahwa nilai  $F_{hitung}$  (6,984) dengan nilai  $p-value = 0,000$  sedangkan  $F_{tabel}$  (2,705) dengan ketentuan  $\alpha = 5\%$ ,  $df_1 = k-1$  atau  $4-1=3$ , dan  $df_2 = n-k$  atau  $95-4=91$ . Hasil uji dari distribusi  $F_{hitung}$  (6,984) lebih besar dari  $F_{tabel}$  (2,705) dengan  $p-value$  (0,000)  $< 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain model regresi fit. Serta hasil perhitungan untuk nilai adjusted  $R^2$  dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau *adjusted*  $R^2$  sebesar 0,957. Hal ini berarti bahwa 95,7% variasi variabel kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM dijelaskan oleh variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan

fiskus, dan sanksi perpajakan. Sementara sisanya 4,3% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian *goodness of fit*. Hasil dapat dilihat pada lampiran.

## 2. Uji Hipotesis (Uji statistik t)

Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. Pengujian regresi digunakan pengujian dua sisi (*two tailed test*) dengan  $\alpha = 5\%$  yang berarti bahwa tingkat keyakinan sebesar 95%. Hasil uji t dapat dilihat pada lampiran. Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa :

- a. Nilai t hitung untuk variabel tingkat kesadaran Wajib Pajak sebesar  $4,729 > 1,986$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
- b. Hasil t hitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar  $29,622 > 1,986$  dan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.
- c. Hasil t hitung untuk variabel sanksi pajak sebesar  $3,448 > 1,986$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,001 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa tingkat sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

## **G. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Kasadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang pertama mendapatkan hasil bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang ditunjukkan dengan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan sebesar  $0,010 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya tingkat kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hasil ini mendukung penelitian Utami et.al.(2012) yang mengungkapkan bahwa wajib pajak sadar bahwa dengan membayar pajak akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara. Ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Begitu juga Arum (2012) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi, Wajib Pajak akan mudah menerima, dan menjalankan peraturan-peraturan terbaru yang

dikeluarkan oleh Pemerintah terutama yang berkaitan dengan kewajiban pajak mereka. Peraturan terbaru untuk Wajib Pajak pelaku UMKM adalah PP. No 46. Dengan tingkat kesadaran Wajib Pajak yang tinggi maka, Wajib Pajak pelaku UMKM akan senantiasa menyesuaikan diri dengan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

## **2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar  $29,622 > 1,968$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima yang artinya pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa sikap fiskus sangat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Apabila fiskus dalam memberikan pelayanan dapat memuaskan serta ramah dan terbuka, maka Wajib Pajak tidak akan merasa malas dalam melaksanakan kewajibannya, kurang patuhnya Wajib Pajak dalam membayar pajak salah satu faktor penyebab adalah ketidaktahuan Wajib Pajak mengenai peraturan yang terbaru yang dikeluarkan pemerintah, ditambah lagi dengan tidak adanya sosialisasi dari fiskus setempat (Gustiana, 2014).

Arum (2012) menyatakan bahwa dengan adanya pelayanan yang memuaskan dari fiskus, maka Wajib Pajak yang awam tidak akan kesulitan

dalam membayar pajak, sehingga kewajiban membayar pajak akan senantiasa dilaksanakan. Namun Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Tiraada (2012) yang menyimpulkan bahwa sikap fikus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak sehingga wajib pajak orang pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang ada di kantor pajak.

### **3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkan hasil bahwa tingkat sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali, yang dibuktikan dengan hasil  $t$  hitung untuk variabel sanksi perpajakan sebesar  $3,448 > 1,986$ , dan nilai signifikan sebesar  $0.001 < 5\%$ , sehingga  $H_1$  diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa tingginya sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administrasi (denda dan bunga) dan sanksi pidana akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Menurut Rustiyaningsih (2011) Wajib Pajak pelaku UMKM merupakan personal yang memperhatikan keuntungan, apabila sering mendapat sanksi dalam membayar pajak, mereka akan berfikir bahwa itu sangat merugikan baik materi (apabila berupa denda) waktu dan nama baik (apabila pidana), apabila hal itu sampai terjadi kemungkinan para pelaku UMKM akan kehilangan kepercayaan dari pihak lain, yang sangat

berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Gustiana (2014) yang menyatakan bahwa penerapan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM, hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat pelanggaran maka akan semakin besar sanksi yang diberikan, dengan mempertimbangkan konsekuensi tersebut maka Wajib Pajak akan lebih patuh dalam menjalankan kewajibannya.